

EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RUKUN WARGA KELURAHAN TANJUNG RHU KOTA PEKANBARU

Parasian Manurung¹, Zaili Rusli², Dadang Mashur³

Universitas Riau, Indonesia^{1,2,3}
E-mail: parasianmanurung294@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa hasil evaluasi program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga (PMB-RW) di Kelurahan Tanjung Rhu dan faktor faktor penghambat evaluasi program PMB-RW di Kelurahan Tanjung Rhu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan pada studi kasus yang bersifat deskriptif melalui proses pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi program PMB-RW belum terlaksana dengan baik dan maksimal serta PMB-RW belum mampu menangani dan mengurangi angka kemiskinan di Kelurahan Tanjung Rhu. Evaluasi konteks program PMB-RW belum sesuai dengan perencanaan, belum mampu menganalisa latar belakang dilaksanakannya PMB-RW serta kesulitan dalam mencapai tujuan. Evaluasi input program PMB-RW belum bisa memanfaatkan sumberdaya yang ada serta identifikasi terhadap sumberdaya belum maksimal.

Kata Kunci: *Evaluasi Program, PMB-RW, Kelurahan Tanjung Rhu*

ABSTRACT

This research is to find out and analyze the evaluation results of the community empowerment program based on the pillars of the community (PMB-RW) in the Tanjung Rhu Village and the inhibiting factors for the evaluation of the PMB-RW program in the Tanjung Rhu Village. This study uses a qualitative research method with a case study approach that is descriptive in nature through the process of collecting interview data, observation, and document study. The results showed that the evaluation of the PMB-RW program had not been carried out properly and maximally and that PMB-RW had not been able to handle and reduce the poverty rate in Tanjung Rhu Village. Evaluation of the context of the PMB-RW program has not been in accordance with the plan, has not been able to analyze the background of the implementation of PMB-RW and difficulties in achieving goals. Evaluation of the input of the PMB-RW program has not been able to utilize existing resources and the identification of resources has not been maximized.

Keywords: *Program Evaluation, PMB-RW, Tanjung Rhu Village*

PENDAHULUAN

Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia merupakan salah satu jawaban alternatif terhadap konsep pembangunan yang ada, dikarenakan masyarakat sadar dan paham mengenai kebutuhan atas dirinya sendiri, sehingga mereka memiliki kemampuan serta Persoalan yang terjadi disebabkan oleh banyak hal, antara lain latar belakang pendidikan, keluarga, tempat tinggal, pekerjaan yang dimiliki, pola pikir akan teknologi dan kemajuan informasi, serta gaya hidup masyarakat yang bermukim di suatu wilayah. Dikarenakan munculnya keberagaman ini, tentu juga akan menimbulkan berbagai macam penanganan yang berbeda ketika suatu kelompok pada bagian masyarakat ingin melakukan perubahan melalui pemberdayaan yang ada, untuk membangun dan memajukan kehidupan dan penghidupan mereka. Seiring berkembangnya waktu, dimana zaman sudah mulai maju dengan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, pemerintah mencari solusi alternatif akan program pemberantasan kemiskinan masyarakat yang lain, hal ini agar bisa menjawab kembali keseriusan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat di tengah tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Sekalipun PNPM, PPK, & IDT sudah dijalankan di periode sebelumnya, tentu tidak bisa serta merta menyelesaikan permasalahan yang ada, maka dari itu Pemerintah

dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif lagi untuk bisa memberikan program dimana bisa mengakomodasi setiap permasalahan ekonomi masyarakat saat ini.

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) khususnya di Pekanbaru ini menjadi sasaran utama pemerintah agar bisa menjadi jawaban untuk kebutuhan akan permasalahan kemiskinan, sebagai upaya nyata kinerja pemerintah saat itu, pada tahun 2014 PMB-RW ini merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh Walikota Pekanbaru. Program ini dijalankan agar bisa menangani kasus kemiskinan di Kota Pekanbaru melalui pendekatan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel. Dimana program ini memadukan antara daya fisik, ekonomi, dan sosial.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kelurahan Tanjung Rhu, pada tahun 2019 PMB-RW dilaksanakan secara serentak di setiap RW yang terdiri dari 5-6 RT yang mengikuti pelatihan bordir & tata boga. Untuk pelatihan bordir, peserta yang mengikuti pelatihan berasal dari RW 01, RW 02, 06, & 07 yang terdiri dari 40 orang sedangkan pelatihan tata boga berasal dari RW 03, RW 04, dan RW 05 terdiri dari 30 orang, dimana pelatihan ini disesuaikan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing RW berdasarkan kesepakatan bersama setiap warga. dan dijabarkan jumlah populasi masyarakat

berdasarkan strata sosial nya masing-masing, mulai dari tingkat kesejahteraan miskin, menengah, dan kaya yang dibagi ke dalam beberapa RT. Terdapat 2466 jiwa / orang yang masuk dalam kategori miskin atau sekitar 734 KK yang memerlukan perhatian dari pemerintah, disini yang berperan penting ialah Kelurahan Tanjung Rhu sebagai wadah pemberdaya masyarakat. Sangat kelihatan sekali ketimpangan yang terjadi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah dan kaya sangatlah sedikit dimana ini sesuai dengan data laporan kegiatan pemberdayaan Kelurahan Tanjung Rhu pada tahun 2019-2020. Penulis mendapatkan beberapa informasi dan data penting yang cukup menarik dari pihak Kelurahan Tanjung Rhu yang menjadi suatu permasalahan pada PMBRW ini: Kebutuhan pelatihan setiap RW di Tanjung Rhu cukup bervariasi dan meningkat, sementara pelatihan yang diberikan hanya sekedar keterampilan yang sama dari tahun ke tahun seperti Tata Boga, Bordir, Pangkas Rambut dan lain lain yang belum tentu sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat, Ada beberapa program yang tidak dipertahankan hingga akhir dikarenakan masih minimnya pengetahuan masyarakat Kelurahan Tanjung Rhu terhadap program PMB-RW sehingga kesulitan untuk memulai kewirausahaan serta memasarkan produknya ke berbagai tempat, Masih belum terlihat secara signifikan perubahan secara ekonomi

dan sosial di lingkungan tanjung rhu sendiri, hal ini dikarenakan masih banyaknya jalan yang belum di semenisasi, penerangan lampu belum secara keseluruhan nyala, drainase jalan masih belum rata sehingga masih ada beberapa kawasan RW banjir di wilayah AMD dan Rintis.tujuan dari penelitian ini ada Untuk mengetahui hasil evaluasi Program PMBRW di Kelurahan Tanjung Rhu pada tahun 2019-2020 dan faktor penghambat pada Evaluasi Program PMBRW di Kelurahan Tanjung Rhu.

KAJIAN PUSTAKA

Evaluasi Merupakan kegiatan untuk menentukan taraf suatu nilai atau tentang sesuatu, termasuk untuk memperoleh suatu informasi yang bisa bermanfaat dalam menilai eksistensi program, produk, prosedur, serta alternatif strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian evaluasi yang berasal dari kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, evaluasi adalah suatu upaya atau cara untuk menentukan nilai atau jumlah. memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai oleh suatu program kegiatan yang sebagaimana dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Berbeda halnya dengan Stufflebeam yang menyampaikan bahwa evaluasi merupakan suatu tahapan proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang memiliki manfaat bagi para pengambil keputusan

dalam menentukan alternatif keputusan lainnya. mengemukakan bahwa secara garis besar fungsi penelitian evaluasi dapat dibedakan menjadi dua yakni :

1. Evaluasi formatif difungsikan sebagai pengumpulan data pada waktu pelatihan suatu program berlangsung. Data dari hasil ini dapat digunakan untuk membentuk (to form) dan memodifikasi program yang berjalan. Jika ditengah kegiatan sudah diketahui dan dianalisa hal negatif apa saja dan setiap pengambil keputusan sudah dapat menentukan sikap dan tindakan terhadap kegiatan program yang sedang berlangsung maka terjadinya pemborosan yang mungkin akan terjadi bisa dicegah atau diminimalisir
2. Evaluasi sumatif difungsikan jika program kegiatan sudah selesai dilaksanakan. Evaluasi sumatif dilaksanakan untuk menentukan sejauh mana sesuatu suatu program memiliki nilai dan manfaat, terutama jika dibandingkan dengan pelaksanaan program yang lain. Penilaian sumatif bermanfaat datanya bagi para pendidik yang akan mengadopsi program yang dievaluasi berkenaan dengan hasil, program, dan prosedur.

Model Evaluasi Stake Model ini digunakan oleh Stake (1967), analisis proses evaluasi yang dikembangkan oleh beliau membawa pengaruh yang besar dalam bidang evaluasi akan suatu program dan mampu berhasil memberi

dasar yang sederhana tetapi konsepnya cukup kuat dalam perkembangan yang lebih jauh dalam bidang evaluasi. Stake memfokuskan terhadap dua dasar kegiatan dalam evaluasi yaitu deskripsi (*description*) dan pertimbangan (*judgement*), serta membagi tiga tahap evaluasi program yaitu : *Antecedents (input)*, *Transaction (process)* dan *Outcomes (output)*

Pada tahapan pendahuluan (*antecedents*) berhubungan dengan kondisi yang terlebih dahulu ada sampai pada saat dilakukan instruksi yang dihubungkan dengan hasil yang dicapai. Tahap transaksi (*transactions*) berhubungan dengan proses dilakukannya instruksi dan hasil yang diperoleh adalah berdasarkan pengaruh dari proses tersebut. Tahap *outcomes* berhubungan dengan hasil yang dicapai setelah program diimplementasikan serta untuk mendapatkan langkah kerja selanjutnya. Penekanan yang sangat penting dalam model ini ialah tahapan yang membuat penilaian tentang program yang dievaluasi. Menurut Mardianah (dalam Wirutomo,2023) memberdayaan dimaknai sebagai cara untuk mendapatkan kekuatan dan mengaitkan dengan kemampuan golongan miskin untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber daya yang menjadi dasar dari kekuasaan dalam suatu sistem maupun organisasi.

Strategi Pemberdayaan Pada dasarnya, kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan hal baru. Usaha pengembangan masyarakat dalam proses pemberdayaan ini dilandaskan

pada ajaran keagamaan, nilai-nilai kebangsaan, dan kebudayaan tradisional seperti semangat gotong royong. Korten (1998) memberikan pandangan bahwa strategi program pembangunan masyarakat harus berorientasi kepada 3 hal, yaitu :

1. *Reliefe & Walfare*

Dimana dengan berusaha segera memenuhi kekurangan atau keperluan tertentu yang dialami suatu individu atau keluarga seperti keperluan makanan, kesehatan, dan pendidikan

2. *Small-scale reliant local development*

Dimana disebut juga dengan pembangunan komunitas, yang meliputi masalah kesehatan, penerapan teknologi, pembangunan infrastruktur.

3. *Sustainable Development*

Mempermasalahkan dampak pembangunan dan selalu melihat jalan keluar atau solusi yang akan ditawarkan, baik pada tingkat lokal, regional, maupun nasional. Pada tahap ini terdapat usaha untuk mempengaruhi perancangan kebijakan pembangunan, strategi ini bisa memberikan dampak perubahan di skala nasional

Konsep PMB-RW sebagai salah satu alternatif solusi terhadap pemberdayaan suatu kelompok masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan, PMB-RW ini dianggap bisa mengakomodasi semua kebutuhan setiap masyarakat yang memiliki kesulitan dalam menjalankan

penghidupannya yang layak dan pantas. Pemberdayaan ini menggunakan konsep pendekatan masyarakat yang berasal dari skala yang rendah, dimulai dari tingkat kelurahan dan menyerap ke semua warga penduduk yang bermukim di suatu rukun warga. Sumber informasi hasil regulasi maupun kearifan lokal tersebut adalah merupakan Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management), hal ini merupakan proses sistematis untuk menemukan, memilih, mengorganisasikan, menyarikan, dan menyajikan informasi dengan cara tertentu, sehingga para pemangku kepentingan mampu memanfaatkan dan meningkatkan penguasaan pengetahuan kondisi Kota Pekanbaru dari masa ke masa menjadi suatu bidang kejadian yang spesifik.

Selama ini banyak produk-produk hukum dan kearifan lokal yang masih merupakan *Tacid Knowledge* bagi pimpinan/lembaga tertentu yang ada di Kota Pekanbaru, sehingga gagasan Walikota Pekanbaru yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak sampai kepada masyarakat. Adapun Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru/Andy Abdillah/2019.(Jurnal FISIP UIR) Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah Keberhasilan Pelaksanaan Program

Pemberdayaan meliputi 3 Aspek yang dikembangkan oleh Sujianto dengan hasil PMB RW di Kelurahan Sidomulyo Barat sudah terlaksana dengan baik tapi belum berpengaruh terhadap kondisi kehidupan sosial masyarakat setempat. beda penelitian Penelitian ini memfokuskan pada Analisa program pemberdayaannya saja pada tahap implementasi, tidak menyinggung hingga tahap evaluasi secara utuh.

METODE

Penelitian ini yang akan digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif, dimana yang dimaksud ialah dengan menggambarkan, menyampaikan, serta mengidentifikasi secara keseluruhan rangkaian peristiwa, fenomena, kejadian, serta kegiatan sosial yang terjadi. Dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif dapat membantu menjelaskan penelitian ini dengan menggunakan model dilaksanakan dan dilakukan Kantor Kelurahan Tanjung Rhu di Jalan Hijrah No 44, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru 28143 beda dengan penelitian yang lain adalah judul Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) Di Kota Pekanbaru/Talgia/2017 dengan hasil Penelitian ini fokusnya pada proses implementasi pemberdayaan saja, tidak kepada proses evaluasi yang seharusnya menjadi bagian proses PMB-RW tersebut. serta di beberapa

RW Kelurahan Tanjung Rhu yang sudah melaksanakan Program PMBRW ini. Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Dimana peneliti akan memperoleh informasi langsung dari pihak atau orang yang langsung terlibat di dalam proses penelitian serta beberapa pihak tambahan yang menjadi pendukung informasi yang akan dijadikan perbandingan data. Adapun informan dalam penelitian ini antara lain Lurah & Staf di Kelurahan Tanjung Rhu Kabid Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Rhu, Ketua Rukun Warga 01-07 Kelurahan Tanjung Rhu, Masyarakat Rukun Warga 01-07 Kelurahan Tanjung Rhu, Camat & Staf di Kecamatan Lima Puluh, Tenaga Pendamping/Pengajar Pelatihan PMB-RW. sumber data menggunakan data langsung berasal dari pihak Kelurahan Tanjung Rhu mulai dari Lurah, Lurah, Bidang Sarana Prasarana Umum, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Ketua RW, dan Masyarakat setempat. dan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen fisik yang berbentuk laporan catatan ataupun dokumentasi serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat mendukung tingkat keakuratan dari data primer yang ada yaitu Rencana Kegiatan Pemberdayaan (RKP) Kelurahan Tanjung Rhu, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Tanjung Rhu, Laporan Kegiatan PMBRW Kelurahan

Tanjung Rhu, Rekaman Wawancara Audiovisual dengan Narasumber. Teknik pengumpulan data yang dipakai berupa observasi, Wawancara dan dokumentasi Serta teknik analisa data menggunakan peneliti akan menggunakan Model Miles & Huberman. Model ini memiliki tahapan dalam pengumpulan data yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi, dimana dengan menggunakan analisis ini peneliti dapat menjelaskan dan menyampaikan secara konkrit gejala dan fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya dalam penelitain Evaluasi Program PMBRW di Kelurahan Tanjung Rhu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada peneliti akan membahas mengenai hasil wawancara dari informan yang berperan dalam pelaksanaan program PMB-RW di Kelurahan Tanjung Rhu. Peneliti akan mengaitkan hasil dari wawancara dengan informan tersebut dengan teori yang digunakan yaitu Teori Evaluasi Model CIPP yang dikembangkan dan dikemukakan oleh Daniel L. Stufflebeam pada tahun 1968 di Ohio State University.

Fenomena kemiskinan perlu dianalisa di setiap KK yang ada sehingga bisa mempermudah Kelurahan Tanjung Rhu untuk mengatasi permasalahan kemiskinan paling tidak dengan mengurangnya atau meminimalisirnya, karena untuk mengentaskan kemiskinan butuh waktu dan skala prioritas yang lebih variatif.

Hal ini didukung oleh pernyataan langsung dari Lurah di Kelurahan Tanjung Rhu sebagai berikut :

“Terkait program PMB-RW memang kami laksanakan sesuai dengan amanat dari Perda dan Perwako yang berlaku dan sudah mengatur secara teknis programnya yang terdiri dari beberapa pelatihan, tapi sebelum kami jalankan program ini pastinya perlu kami lihat dulu dan kami kumpulkan datanya berapa warga yang masuk kategori miskin dan memerlukan bantuan program ini, kami meminta bantuan juga dari pihak RW maupun RT agar sekiranya bisa membantu memberikan data warganya agar mempermudah pelaksanaan program ini nanti” (**Wawancara dengan Bapak Rusli, S.Sos pada tanggal 14 Desember 2022**)

Sesuai dengan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Kelurahan Tanjung Rhu memiliki peran untuk mengidentifikasi fenomena sosial seluruh warga dari masyarakat di Kelurahan Tanjung Rhu yang dianggap masuk kategori miskin dan memerlukan bantuan program PMB-RW, karena ini sesuai juga dengan tahapan evaluasi yang paling pertama yaitu evaluasi konteks dengan melakukan analisa terhadap latar belakang program yang akan dijalankan dan perumusan program yang tepat sasaran kedepan agar lebih memudahkan Kelurahan Tanjung Rhu untuk mencapai tujuannya. Jika diperhatikan secara lebih detail, maka bisa dilihat bahwa angka kemiskinan

yang lebih tinggi dari angka kesejahteraan ialah yang menjadi latar belakang PMB-RW ini dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Rhu.

Context Evaluation

Pelaksanaan evaluasi program PMB-RW ini juga dikemukakan oleh Daniel L. Stufflebeam (1968) dengan melakukan analisa komprehensif secara mendalam terkait dengan masalah dan kebutuhan, dari sini Kelurahan Tanjung Rhu yang berperan sebagai fasilitator program PMB-RW mampu mengetahui permasalahan dan kebutuhan di setiap RW dan RT di Kelurahan Tanjung Rhu. Jika dikaitkan dengan data yang peneliti telah kumpulkan, di Kelurahan Tanjung Rhu terdiri dari 7 Rukun Warga dan 42 Rukun Tetangga, dimana rata-rata setiap RT memiliki 5-6 jiwa/penduduk dalam 1 KK (Kartu Keluarga). Tentu saja fenomena kemiskinan perlu dianalisa di setiap KK yang ada sehingga bisa mempermudah Kelurahan Tanjung Rhu untuk mengatasi permasalahan kemiskinan paling tidak dengan menguranginya atau meminimalisirnya, karena untuk mengentaskan kemiskinan butuh waktu dan skala prioritas yang lebih variatif.

Hal ini didukung oleh pernyataan langsung dari Lurah di Kelurahan Tanjung Rhu sebagai berikut :

“Terkait program PMB-RW memang kami laksanakan sesuai dengan amanat dari Perda dan Perwako yang berlaku dan sudah mengatur secara teknis programnya yang terdiri dari beberapa pelatihan,

tapi sebelum kami jalankan program ini pastinya perlu kami lihat dulu dan kami kumpulkan datanya berapa warga yang masuk kategori miskin dan memerlukan bantuan program ini, kami meminta bantuan juga dari pihak RW maupun RT agar sekiranya bisa membantu memberikan data warganya agar mempermudah pelaksanaan program ini nanti” (Wawancara dengan Bapak Rusli, S.Sos pada tanggal 14 Desember 2022)

Sesuai dengan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Kelurahan Tanjung Rhu memiliki peran untuk mengidentifikasi fenomena sosial seluruh warga dari masyarakat di Kelurahan Tanjung Rhu yang dianggap masuk kategori miskin dan memerlukan bantuan program PMB-RW, karena ini sesuai juga dengan tahapan evaluasi yang paling pertama yaitu evaluasi konteks dengan melakukan analisa terhadap latar belakang program yang akan dijalankan dan perumusan program yang tepat sasaran kedepan agar lebih memudahkan Kelurahan Tanjung Rhu untuk mencapai tujuannya. Jika diperhatikan secara lebih detail, maka bisa dilihat bahwa angka kemiskinan yang lebih tinggi dari angka kesejahteraan ialah yang menjadi latar belakang PMB-RW ini dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Rhu.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Lurah Tanjung Rhu berkeyakinan bahwa solusi PMB-RW memang bukanlah satu-satunya jalan, akan tetapi ini salah satu jalan untuk

mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Tanjung Rhu. Kemiskinan memang akan selalu ada, tetapi setidaknya dengan adanya data warga yang sudah dikumpulkan bisa menjadi langkah awal untuk merumuskan tujuan pemberdayaan yang lebih baik, sesuai di akhir wawancara dengan beliau bahwa mereka sangat mengutamakan pelayanan bagi masyarakat secara keseluruhan. Pada tahap evaluasi konteks ini, Stufflebeam (1968) juga mengemukakan bahwa perumusan program merupakan hal yang penting untuk melihat sejauh mana konteks pelaksanaan evaluasi pada suatu program, hal ini bertujuan untuk mempermudah jalannya pelaksanaan program. Kelurahan Tanjung Rhu memiliki keyakinan juga bahwa tidak lain, untuk mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Tanjung Rhu ialah dengan menyusun strategi pemberdayaan yang tepat sasaran dan tujuan di awal. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Sekretaris Lurah terkait dengan sasaran program serta mengapa tujuan PMB-RW ini penting untuk dicapai karena sesuai dengan amanat dari peraturan walikota Kota Pekanbaru.

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu Staf Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat terkait dengan perencanaan pemberdayaan dan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan di beberapa RW & RT di Kelurahan Tanjung Rhu sebagai berikut:

“Sebelum kami laksanakan program PMB-RW ini tentunya kami libatkan semua anggota masyarakat di Kelurahan Tanjung Rhu, disini yang paling penting ialah Ketua RW 1-7, karena mereka yang menjembatani kami kepada seluruh warga di RW masing-masing. Sudah kami sampaikan prioritas dari Bapak Lurah saat itu utamakan untuk pembangunan beberapa fasilitas sarana dan prasarana, khususnya untuk kebutuhan Ibu yang baru lahir dan untuk bayi mereka. Sasaran Kelurahan bukan hanya pelatihan keterampilan saja, tetapi pembangunan fisik juga” (Wawancara dengan Bapak Musdianto pada tanggal 14 Desember 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disampaikan bahwa sasaran dan tujuan pelaksanaan program diberikan juga kepada mereka yang bukan hanya untuk pelatihan PMB-RW saja, tetapi juga dari pembangunan fisik yaitu sarana dan prasarana di Kelurahan Tanjung Rhu. Sebagai inisiator pelayanan di tingkat yang paling rendah, tentu jangkauan pelayanan Kelurahan Tanjung Rhu bukan hanya sekedar urusan administrasi saja, tetapi juga pada tingkatan yang lebih mendalam seperti halnya kesejahteraan keluarga di setiap RW di Kelurahan Tanjung Rhu. Akan tetapi terkait dengan evaluasi program PMB-RW di Kelurahan Tanjung Rhu, peneliti menyadari juga bahwa tidak semua program PMB-RW memenuhi keinginan dan kemauan masyarakat di Kelurahan Tanjung Rhu. Perlu

ditegaskan kembali pada teori yang dikemukakan sebelumnya yaitu pada Sub teori Evaluasi Konteks, pada suatu program ada besar kemungkinan tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, bahkan justru menimbulkan pertanyaan dari masyarakat, apakah betul program PMB-RW ini mampu menjawab dan mengakomodir situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Tanjung Rhu yang masih dilanda kemiskinan.

Input Evaluation

Apabila dikaitkan dengan evaluasi program PMB-RW dari sisi input, disini akan dibahas terkait dengan sumberdaya yang digunakan terutama dari sisi anggaran, pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan program, alternatif program selain pelatihan keterampilan, dan proses penjadwalan program pemberdayaan yang sudah disusun oleh pihak Kelurahan Tanjung Rhu. Program Pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Tanjung Rhu tentu saja memerlukan bantuan dari sisi sumberdaya yang ada, khususnya di bagian anggaran, bagaimana memaksimalkan program dengan anggaran yang sudah ditetapkan dari Pemerintah Provinsi Riau, seperti diketahui diawal target dan sasaran program ini ialah masyarakat yang tingkat kesejahteraannya masih dibawah rata-rata atau sulit ekonomi, sehingga memerlukan pemberdayaan yang efektif untuk menangani kasus tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat terkait penggunaan anggaran untuk PMB-RW sebagai berikut:

“Jadi sebelum kami melaksanakan program PMB-RW, Kelurahan perlu menyiapkan proposal Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), disitu kami jelaskan apa saja programnya, kemudian nanti apabila sudah disetujui oleh Bappeda, akan terbit Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) Kecamatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing program PMB-RW. Sebagai contoh, pada November 2019 ada pelatihan Tata Boga untuk RW 02, 04, dan 06 dan Bordir untuk RW 01, 03, 05, dan 07 anggaran yang disetujui ialah Rp.100.000.000 itu juga sudah termasuk pembangunan fisik berupa semenisasi di RW 02, RW 04, & RW 06 semua diinstruksikan oleh pihak kecamatan untuk melaksanakan programnya, karena kordinasi ini bisa memudahkan tugas kami”(Wawancara dengan Bapak Agus S.Sos pada tanggal 14 Desember 2022)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, kelurahan Tanjung Rhu menyusun program terlebih dahulu melalui Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang nanti kemudian disusun dalam bentuk proposal kepada pihak kecamatan, disini Kecamatan yang dimaksud ialah Kecamatan Limapuluh karena masuk ruang lingkungnya, setelah dibuat kemudian diajukan dan disetujui oleh Bappeda Provinsi Riau, setelah disetujui dan terbit Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) oleh

Kecamatan, kemudian camat menginstruksikan agar dana atau anggaran digunakan untuk pelaksanaan program PMB-RW di tingkat kelurahan.

1. Faktor Penghambat Program PMB-RW

Data penduduk yang dimiliki oleh Kelurahan tidak valid & tidak terpenuhi secara utuh. Yang sangat disayangkan dari sini ialah data dari masyarakat Kelurahan Tanjung Rhu hanya terdeteksi sampai tahun 2020 saja, dimana keterlibatan masyarakat yang masih dikatakan masih minim untuk melaporkan keberadaan domisili mereka kepada pihak kelurahan, hal ini tidak lepas dari adanya aktifitas perpindahan penduduk secara rutin 2 tahun terakhir. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Lurah Tanjung Rhu berikut disampaikan demikian:

“Kami kesulitan mendapatkan data penduduk terbaru, karena banyaknya masyarakat berpindah tempat atau datang kemari tetapi tidak melaporkannya kepada kami, sehingga data penduduk yang telah kami terima dari RW & RT setempat sangat terbatas. Ditambah lagi dengan persoalan ekonomi penduduk di daerah ini yang masih harus kami susun lagi dari tahun ke tahun untuk laporan kepada pihak kecamatan limapuluh” (Wawancara dengan Bapak Rusli S.Sos pada tanggal 26 Desember 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa data penduduk terbaru menjadi sangat

penting, khususnya untuk mengetahui angka pasti dari populasi data penduduk yang masih mengalami kemiskinan atau kesulitan secara sosial dan ekonomi.

2. Transparansi penggunaan anggaran yang tidak proposional dan tidak merata

Keberlangsungan satu program PMB-RW apabila diteruskan. Seperti contohnya Budidaya Ikan Lele yang dilakukan pada tahun 2018 silam, dimana ketika bibit diberikan pengelolaan tahap lanjut tidak diberikan secara tuntas, ini mengakibatkan masyarakat menjadi bingung untuk melakukan pengembangan budidaya ikan lele secara konsisten dan sasaran pasar untuk dijual atau mungkin dibudidaya kembali.

Sebagai pendukung, peneliti melakukan wawancara dengan warga di RW 04 yang sebelumnya menerima pelatihan tersebut, berikut penjelasannya:

“Iya saat itu kami diberikan pelatihan selama 1 minggu, jadi materi dari budidaya ikan lele sampai kepada tahap bagaimana pemeliharaan dan pengembangan bibit di kolam, kemudian manajemen pakan yang rutin diberikan sampai kepada tahapan penjualan ikan lele yang siap panen. Tetapi kami tidak diberikan pengetahuan secara lebih lanjut pangsa pasar mana yang jadi tujuan kami, sehingga kami bingung untuk menggunakannya”(Wawancara dengan

Bapak Muhammad Ikhlas pada tanggal 19 Desember 2022)

3. Rumusan perencanaan program yang tidak tepat sasaran

Adanya ketidaksesuaian perencanaan program sehingga tidak tepat sasaran, salah satunya ialah pembatasan kuota pelatihan PMB-RW & batas waktu yang diberikan, dimana peserta hanya diberikan pada 30 orang saja, paling banyak yaitu 40 orang dan sudah mewakili semua RW. Sementara pada perencanaan program diawal, pelatihan PMB-RW tidak terbatas pada pihak siapapun dan dimanapun. Padahal jika dikaitkan pada sub teori yang dikemukakan oleh Stufflebeam (1968), pelaksanaan evaluasi baik yang dimulai dari konteksnya, inputnya, prosesnya hingga produknya harus memperhatikan satu hal yang sangat krusial yaitu latar belakang dan analisa permasalahan diawal serta perumusan program yang sudah terencana hingga nanti selesai. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu Staf di Kelurahan Tanjung Rhu sebagai berikut:

“Iya betul karena kami perlu terangkan bahwa pelatihan hanya seminggu saja dan untuk kuota pun kami batasi, mengingat kami perlu mengerjakan program kelurahan yang lain juga, tapi sebisa mungkin kami maksimalkan agar tidak percuma saja berjalan PMB-RW nya, yang penting sudah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku”(Wawancara dengan Ibu Donna pada tanggal 19 Desember 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa menurut peneliti, pelatihan PMB-RW sangatlah singkat dan tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang masih memerlukan pelatihan keterampilan secara intens dan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan sudah berasal dari ketentuan yang berlaku, dimana pelatihan hanya diberikan maksimal 1 minggu dan sudah termasuk praktek pelaksanaan setiap program PMB-RW, ini tentu tidak cukup apabila berbicara tentang kompleksitas permasalahan penduduk di Kelurahan Tanjung Rhu yang mana angka kemiskinan saja menyentuh angka 50 persen dari total populasi yang ada saat ini, idealnya untuk memberikan pelatihan secara bergilir tentu butuh waktu yang lebih panjang dan lama, khususnya untuk mereka yang membutuhkan, apalagi kedepannya situasi ekonomi belum bisa ditebak dan masih ada kemungkinan untuk bergejolak serta tidak tentu.

KESIMPULAN

Program PMB-RW masih belum mampu mengatasi masalah kemiskinan di Kelurahan Tanjung Rhu dan mengingat kondisi demografis penduduk yang tingkatan kemiskinan cukup tersebar banyak, sehingga Kelurahan Tanjung Rhu mengalami kesulitan untuk menanganinya. Hal ini dapat dilihat dari 4 sub teori yang dikemukakan oleh Daniel L. Stufflebeam pada Teori Evaluasi Program, sebagai berikut: Konteks evaluasi program PMB-RW. Kelurahan

Tanjung Rhu masih dianggap belum menggali secara lebih mendalam terkait dengan kebutuhan masyarakat, sehingga program yang selalu berjalan tidak memenuhi keinginan RW & RT dan program PMB-RW ini perumusan rencananya belum terlihat dengan baik pada saat pengumpulan data kemiskinan penduduk, terlihat bahwa memang di beberapa RW & RT masih ditemukan keluarga yang sulit secara ekonomi.

Input evaluasi program PMB-RW. Kelurahan Tanjung Rhu masih belum memiliki kapasitas mumpuni untuk menangani 7 RW dengan sebaran 42 RT, dimana rata-rata angka kemiskinan berdasarkan data per KK diatas 100 dari total populasi 600-800 KK/Jiwa. Ini sangat timpang sekali dengan program pelatihan PMB-RW yang jumlahnya hanya 5-6 program saja ditambah juga masih dibantu dari sisi pembangunan fisik semata yang hanya mengatasi masalah sosial secara keseluruhan, bukan ekonomi. Anggaran yang sangat besar tidak sepadan dengan program, hanya membuang waktu, tenaga, dan materi saja. Proses evaluasi program PMB-RW. Kelurahan Tanjung Rhu menjalankan implementasi program ini tanpa melakukan revisi kepada program-program yang sebelumnya tidak berhasil mencapai indikator keberhasilan. Padahal apabila ditelusuri secara detil, evaluasi proses ini harus dilakukan karena untuk apa menjalankan program yang tidak menjawab kebutuhan masyarakat,

ditambah lagi ketika program sudah berjalan adanya pembatasan waktu dan kuota PMB-RW sangatlah rancu, jika program tersebut ingin efektif tentu harus secara keseluruhan dilakukan kepada semua elemen masyarakat miskin. Faktor Penghambat jalannya program PMB-RW ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh peneliti antara lain: Ketersediaan data penduduk yang tidak valid dan terbatas sehingga menyebabkan identifikasi masyarakat miskin menjadi sulit untuk dilakukan. Saran Kelurahan Tanjung Rhu perlu menyampaikan data valid dari total populasi penduduk, kalau bisa 1 tahun terakhir ini sehingga tidak menyebabkan ketimpangan populasi masyarakat miskin dan menengah keatas serta menganalisa perpindahan penduduk dari satu tempat ke Kelurahan Tanjung Rhu atau sebaliknya. Disarankan kepada Kecamatan dan Kelurahan untuk selalu melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada setiap RW & RT terkait PMB-RW ini, apa saja yang menjadi tujuan, apa saja program yang diberikan, siapa saja masyarakat yang boleh menerima, dan bagaimana hasil positif yang dapat diterima dan dimanfaatkan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis*

- Kerakyatan.* Bandung: *Otonomi Daerah.* Pekanbaru : Humaniora. Penerbit Taman Karya
- Barber, Michael P. 1972. *Public Administration. The English Language Book Society and Macdonald and Evans LTD* : London
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif.* Prenada Media Group : Jakarta
- Friedmann, J. 1993. *Empowerment, The Politics of Alternatif Development.* Cambridge, Mass : Black Well Publisher
- Gunawan Sumodiningrat. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat.* Jakarta : Bina Rena Parawira
- Isbandi Rukminto. 2003. *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas.* Jakarta : LPFE Universitas Indonesia
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Pranarka, M.W & Moeljarto, Vidhandika. 1996. *Pemberdayaan (Empowerment), Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan, dan Implementasi.* CSIS : Jakarta
- Rusli, Zaili. 2017. *Tata Kelola Pembangunan Kawasan Studi Peralihan Fungsi Kawasan Hutan ke Usaha Perkebunan di Riau.* Pekanbaru : Penerbit Alaf
- Rusli, Zaili. Adianto. Mashur, Dadang. 2020. *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Bingkai*
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial.* Refika Aditama : Bandung
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat.* Jakarta : Citra Utama
- Wilson Tery. 1996. *Empowerment Manual.* London : Grower Publishing Company
- Andy Abdillah. 2019. *Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.* *Jurnal Universitas Islam Riau*
- Talgia. 2017. *Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW) di Kota Pekanbaru.* *Jurnal Renaissance,* Vol 02 No 02
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru
- Peraturan Walikota Pekanbaru No 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru
- Peraturan Walikota Pekanbaru No 70 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

Volume 9, Nomor 2, Mei 2023

Website: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>

Submitted 6 Januari 2023, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023

ISSN: 2442-3777 (cetak)

ISSN: 2622-691X (online)

(331-345)

Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru	Dokumen Realisasi Anggaran Kelurahan Tanjung Rhu 2019/2020
Undang Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Dokumen Populasi Penduduk & Demografi Wilayah Kelurahan Tanjung Rhu 2020/2021
Dokumen Laporan Pelaksanaan PMB- RW dan Pembangunan Sarana & Prasarana di Tingkat Kelurahan Tanjung Rhu 2019/2020	Laporan Rencana Kegiatan Tahunan & Kepengurusan RW & RT di Kelurahan Tanjung Rhu 2018- 2023
Dokumen Pelaksanaan Anggaran PMB-RW di Kecamatan Limapuluh 2019/2020	